



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR **66** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 terdapat Perubahan Rincian Dana Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka perlu Merubah atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

27. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
34. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63);
35. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 85);

36. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
37. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa, Pagu bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pagu Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus serta Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 yakni berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam (Lampiran I) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp. 261.814.844.000,- (*dua ratus enam puluh satu milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*), dan ditambah Insentif Desa sebesar Rp. 8.416.928.000,- (*delapan milyar empat ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) bagi 59 desa, sehingga total rincian Alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp. 270.231.772.000,- (*dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan Dana Desa untuk anggaran Insentif Desa kepada Bupati Cq. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari desa baik *Dokumen Hard Copy maupun Dokumen Digital (PDF)*, dan ditindaklanjuti dengan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, benar dan sah), selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen Ceklist Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk *Dokumen Digital (PDF)* dan beberapa *Dokumen Hard Copy*, diantaranya :
 1. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (*Dokumen*)
 2. Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDes yang sudah disahkan Kepala Desa dengan lampiran:
 - a. Lampiran 1.a - Perdes APBDes;
 - b. Lampiran 1.b - Perdes APBDes;
 - c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan;
 - d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja;
 - e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan;
 - f. Ringkasan APBDes 1.b per sumber dana (PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, DLL); dan
 - g. Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai Perubahan Penjabaran APBDes yang sudah disahkan dari Kepala Desa. dengan lampiran :
 1. Lampiran 1.c - Penjabaran APBDes.
 4. Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) berserta lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan RKPDes;
 5. Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, (jika tersedia) berserta lampiran usulan penyertaan modal dari Bumdes;
 7. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK) Perubahan, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan, Rencana Kegiatan Desa (DPA), dan Kegiatan Lanjutan (DPAL) (jika ada);
 8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 9. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD;
 10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
 11. Fotokopi Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa;
 12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
 13. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;

14. Fotokopi Buku Nomor Rekening Desa;
15. Fotokopi NPWP Desa;
16. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa yang diketahui Camat, beserta lampiran daftar penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa/tidak terdapat penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa dan dokumen pendukung lainnya, berupa :
 - a. Hasil Berita Acara Musdesdus/Musyawarah insidentil daftar penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa/tidak terdapat penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa.,
 - b. Surat Permohonan Pengesahan/mengetahui Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa ke Camat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
17. Lembar Evaluasi APBDes yang sudah disetujui Bupati melalui camat atau sebutan lain guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDes atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes sebelum APBDes Disahkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
18. Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDes yang telah di tandatangani oleh Tim Evaluasi APBDes, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
19. Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) dari Kepala Desa (*Dokumen*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
20. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa, (Laporan Realisasi APBDes Per Sumberdana 1.b);
21. Laporan Output Dana Desa Sampai dengan Tahap I melalui Aplikasi OM-SPAN yang ditandatangani kepala desa dan dicap basah (Laporan Daftar Paket Kegiatan Dana Desa dan Realisasi Penyerapan);
22. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa yang sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran :
 - a. Ringkasan Perubahan APBDes Dana Desa Tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (Ringkasan APBDes 1.a dan 1.b per sumberdana); dan

- b. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Desa tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desadengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gambar.(RAB 2 – Kegiatan per sumber dana).
23. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan Kode Rekening Kegiatan dan Belanja pada Siskeudes untuk Anggaran Insentif Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 24. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 25. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Dana Desa yang diterima, bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 26. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap Tahun lalu/tahap sebelumnya (Wajib);
 27. Fotocopi Bukti Sctor Balik Sisa dana tahun lalu/tahap sebelumnya yang diterbitkan oleh bank (wajib jika ada);
 28. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap akhir tahun sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD Kecamatan (arsip wajib);
 29. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 30. Surat Pengantar dari Camat; *(Dokumen)*
 31. Surat Permohonan Pencairan desa dari Camat; *(Dokumen)*
 32. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi Tim Verifikasi Kecamatan (lengkap, benar dan sah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 33. Pernyataan Kepala Desa terkait Komitmen penganggaran Insentif Desa dalam APBDes. (Lampiran XXIX).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal *20 september* 2024
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal *20 september 2024*
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR **66**

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR				
		DESA		
		KECAMATAN		
LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN PENCAIRAN				
Desa :				
No. Surat :				
Tgl. Surat :				
Jenis Permintaan : Dana Desa (DDS)				
Keterangan Pengajuan : Anggaran Insentif Desa				
No. Permohonan :				
Jumlah Diminta :				
NO	KELENGKAPAN BERKAS	SYARAT PERMOHONAN	CEK LIST	Keterangan
		DDS		
1	Surat Pengantar dari Kepala desa	✓		
2	Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDDes yang sudah disahkan Kepala Desa dengan lampiran :	✓		
	a. Lampiran 1a - Perdes APBDDes.			
	b. Lampiran 1b - Perdes APBDDes.			
	c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan.			
	d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja.			
	e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan.			
	f. Ringkasan APBDDes 1b per sumber dana (PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, DLL).			
	g. Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.			
3	Peraturan Kepala Desa mengenai Perubahan Penjabaran APBDDes yang sudah disahkan dari Kepala Desa. Dengan lampiran :	✓		
	a. Lampiran 1c - Penjabaran APBDDes.			
4	Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) berserta lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan RKPDes.	✓		
5	Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa	✓		
6	Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, (jika tersedia) berserta lampiran usulan penyertaan modal dari bumdes	✓		
7	7. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK) Perubahan, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan, Rencana Kegiatan Desa (DPA), dan Kegiatan Lanjutan (DPAL) (jika ada)	✓		
8	Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa	✓		
9	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD	✓		
10	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).	✓		
11	Fotocopy Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa.	✓		
12	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).	✓		
13	Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	✓		
14	Fotocopy Buku Nomor Rekening Desa.	✓		
15	Fotocopy NPWP Desa.	✓		
16	Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diketahui Camat. beserta lampiran daftar penerima BLT Desa/tidak terdapat penerima BLT Desa dan dokumen pendukung lainnya :	✓		
	a. Hasil Berita Acara Musdeswas/Musyawahar insidentil daftar penerima BLT Desa/tidak terdapat penerima BLT Desa.			
	b. Surat Permohonan Pengesahan/mengetahui Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa ke Camat.			
17	Lembar Evaluasi APBDDesa yang sudah disetujui Bupati melalui Camat atau sebutan lain guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDDesa sebelum APBDDes Disahkan	✓		
18	Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDDesa yang telah ditandatangani oleh Tim Evaluasi APBDDesa.	✓		
19	Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) dari Kepala Desa.	✓		
20	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa, (Laporan Realisasi APBDDes Per Sumberdana 1.b).	✓		
21	Laporan Output Dana Desa Sampai dengan Tahap I melalui Aplikasi OM-SPAN yang ditandatangani kepala desa dan dicap basah (Laporan Daftar Paket Kegiatan Dana Desa dan Realisasi Penyerapan).	✓		
22	Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa yang sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran :	✓		
	a. Ringkasan Perubahan APBDDes Dana Desa Tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (Ringkasan APBDDes 1a dan 1b per sumberdana).			
	b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Desa tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gambar. (RAB 2 – Kegiatan per sumberdana).			
23	Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk Anggaran Insentif Desa.	✓		
24	Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa tahap akhir tahun sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu).	✓		
25	Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Dana Desa yang diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu).	✓		
26	Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap Tahun lalu/tahap sebelumnya. (Wajib).	✓		
27	Foto Copy Bukti Setor Balik Sisa dana tahun lalu/tahap sebelumnya yang diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).	✓		
28	Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap akhir tahun sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).	✓		
29	Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah).	✓		
30	Pernyataan Kepala Desa terkait Komitmen penganggaran Insentif Desa dalam APBDDes.	✓		
Catatan :				

*) Coret Yang Tidak Perlu

Diketahui
Kepala Desa,

diteliti oleh :
Sekretaris Desa,

Bendahara Desa



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 KECAMATAN

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN PENCAIRAN

Desa : _____
 No. Surat Pengantar dari Desa : _____
 Tgl. Surat Pengantar dari Desa : _____
 No. Surat Permohonan Pencairan dari Desa : _____
 Tgl. Surat Permohonan Pencairan dari Desa : _____
 Jenis Permintaan : Dana Desa (DDS)
 Keterangan Pengajuan : Anggaran Insentif Desa
 No. Surat Pengantar dari Kecamatan : _____
 Tgl. Surat Pengantar dari Kecamatan : _____
 Nomor Surat Permohonan Pencairan untuk Desa dari Kecamatan : _____
 Tanggal Surat permohonan untuk desa dari kecamatan : _____
 Kecamatan : _____
 Jumlah yang diminta : _____

NO	KELENGKAPAN BERKAS	SYARAT PERMOHONAN	CEK LIST	Keterangan
		DDS		
1	Surat Pengantar dari Kepala desa	✓		
2	Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDes yang sudah disahkan Kepala Desa dengan lampiran :	✓		
	a. Lampiran 1a - Perdes APBDes.			
	b. Lampiran 1b - Perdes APBDes.			
	c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan.			
	d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja.			
	e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan.			
	f. Ringkasan APBDes 1b per sumber dana (PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, DLL).			
	g. Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.			
3	Peraturan Kepala Desa mengenai Perubahan Penjabaran APBDes yang sudah disahkan dari Kepala Desa. Dengan lampiran :	✓		
	a. Lampiran 1c - Penjabaran APBDes.			
4	Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) beserta lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan RKPDDes.	✓		
5	Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa	✓		
6	Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, (jika tersedia) beserta lampiran usulan penyertaan modal dari bumdes	✓		
7	7. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK) Perubahan, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan, Rencana Kegiatan Desa (DPA), dan Kegiatan Lanjutan (DPAL) (jika ada)	✓		
8	Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa	✓		
9	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD	✓		
10	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).	✓		
11	Fotocopy Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa	✓		
12	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).	✓		
13	Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	✓		
14	Fotocopy Buku Nomor Rekening Desa.	✓		
15	Fotocopy NPWP Desa.	✓		
16	Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diketahui Camat, beserta lampiran daftar penerima BLT Desa/tidak terdapat penerima BLT Desa dan dokumen pendukung lainnya :	✓		
	a. Hasil Berita Acara Musdesus/Musyawarah insidentiti daftar penerima BLT Desa/tidak terdapat penerima BLT Desa.			
	b. Surat Permohonan Pengesahan/mengetahui Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa ke Camat.			
17	Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui Camat atau sebutan lain guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa sebelum APBDes Disahkan	✓		
18	Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah di tandatangani oleh Tim Evaluasi APBDesa	✓		
19	Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) dari Kepala Desa.	✓		
20	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa, (Laporan Realisasi APBDes Per Sumberdana 1.b).	✓		
21	Laporan Output Dana Desa Sampai dengan Tahap I melalui Aplikasi OM-SPAN yang ditandatangani kepala desa dan dicap basah (Laporan Daftar Paket Kegiatan Dana Desa dan Realisasi Penyerapan).	✓		
22	Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa yang sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran :	✓		
	a. Ringkasan Perubahan APBDes Dana Desa Tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (Ringkasan APBDes 1a dan 1b per sumberdana).			
	b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Desa tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gambar. (RAB 2 - Kegiatan per sumberdana).			
23	Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk Anggaran Insentif Desa	✓		
24	Surat Pernyataan Tanggungjawab kepala Desa tentang penggunaan Dana Desa tahap akhir tahun sebelumnya, bernominal Rp. 10.000 (sepuluh ribu).	✓		
25	Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Dana Desa yang diterima, bernominal Rp. 10.000 (sepuluh ribu).	✓		
26	Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap Tahun lalu/tahap sebelumnya. (Wajib).	✓		
27	Foto Copy Bukti Setor Balik Sisa dana tahun lalu/tahap sebelumnya yang diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).	✓		
28	Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap akhir tahun sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).	✓		
29	Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah).	✓		
30	Pernyataan Kepala Desa terkait Komitmen penganggaran Insentif Desa dalam APBDes.	✓		
31	Surat Pengantar dari Camat	✓		
32	Surat Permohonan Pencairan desa dari Camat	✓		
33	Lembar verifikasi dan kelengkapan berkas dari desa untuk permohonan pencairan yang diverifikasi oleh Tim Ferivikasi kecamatan (lengkap, benar dan sah)	✓		

Catatan :

*) Coret Yang Tidak Perlu

Diketahui
 Camat

Verifikasi Tingkat Kecamatan :
 Kasi Verifikasi,

Staf Verifikasi

FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN INSENTIF DESA

(KOP SURAT).....(1)

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN
INSENTIF DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (2)
Jabatan: Kepala Desa (3)
Alamat : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Insentif Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp..... (5) akan dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2024.
2. Insentif Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal terdapat sisa atas Insentif Desa Tahun Anggaran 2024, akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....(6),

Kepala Desa(7)

METERAI
Rp10.000

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	Uraian
(1)	Diisikop surat Desa tersebut
(2)	Diisi dengan nama Kepala Desa
(3)	Diisi dengan nama Desa tempat menjabat
(4)	Diisi dengan alamat tempat tinggal Kepala Desa
(5)	Diisi jumlah insentif Desa
(6)	Diisi nama Kota dan tanggal penandatanganan
(7)	Diisi dengan nama Desa
(8)	Diisi nama Kepala Desa

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DEJA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA	ALOKASI PENGHARGAAN DESA DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)
1	MARTAPURA	1.2006	PEMERINTAH DESA TANJUNG KEMALA	607.490.000	364.357.000	-	255.750.000			1.227.597.000
		1.2009	PEMERINTAH DESA KOTA BARU	733.178.000	458.938.000	-	-			1.192.116.000
		1.2010	PEMERINTAH DESA KEROMONGAN	670.334.000	149.515.000	-	255.750.000			1.075.599.000
		1.2011	PEMERINTAH DESA PERJAYA	670.334.000	587.972.000	-	255.750.000			1.514.056.000
		1.2015	PEMERINTAH DESA SUKOMULYO	607.490.000	191.871.000	-	-			799.361.000
		1.2020	PEMERINTAH DESA KOTABARU BARAT	670.334.000	345.554.000	-	255.750.000			1.271.638.000
		1.2021	PEMERINTAH DESA KOTABARU SELATAN	670.334.000	139.745.000	-	255.750.000			1.065.829.000
		1.2022	PEMERINTAH DESA PERJAYA BARAT	607.490.000	155.278.000	-	255.750.000			1.018.518.000
		1.2023	PEMERINTAH DESA TANJUNG KEMALA BARAT	607.490.000	301.620.000	-	255.750.000			1.164.860.000
2	BUAY MADANG	2.2001	PEMERINTAH DESA SUKA RAJA	670.334.000	143.427.000	-	-			813.761.000
		2.2002	PEMERINTAH DESA KURUNGAN NYAWA	670.334.000	414.074.000	-	-			1.084.408.000
		2.2003	PEMERINTAH DESA PISANG JAYA	544.646.000	173.012.000	-	-			717.658.000
		2.2004	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	607.490.000	104.615.000	-	-			712.105.000
		2.2005	PEMERINTAH DESA TEBAT JAYA	670.334.000	174.356.000	-	-			844.690.000
		2.2006	PEMERINTAH DESA SRIDADI	607.490.000	149.538.000	-	-			757.028.000
		2.2009	PEMERINTAH DESA TANJUNG BULAN	670.334.000	203.207.000	-	255.750.000			1.129.291.000
		2.2010	PEMERINTAH DESA WAY HALOM	607.490.000	257.391.000	-	-			864.881.000
		2.2031	PEMERINTAH DESA KURUNGAN NYAWA I	607.490.000	228.741.000	-	-			836.231.000
		2.2032	PEMERINTAH DESA KURUNGAN NYAWA II	607.490.000	231.984.000	-	-			839.474.000
		2.2033	PEMERINTAH DESA KURUNGAN NYAWA III	544.646.000	167.415.000	-	-			712.061.000
		2.2034	PEMERINTAH DESA CIPTA MUDA	607.490.000	177.943.000	-	-			785.433.000
		2.2035	PEMERINTAH DESA AMAN JAYA	607.490.000	137.542.000	-	-			745.032.000
		2.2036	PEMERINTAH DESA SUKARAJA TUHA	607.490.000	271.963.000	-	-			879.453.000
		2.2037	PEMERINTAH DESA GANJAR AGUNG	544.646.000	177.881.000	-	-			722.527.000
2.2038	PEMERINTAH DESA MULYO AGUNG	607.490.000	232.341.000	-	-	144.516.000		984.347.000		
2.2039	PEMERINTAH DESA MUDA SENTOSA	544.646.000	141.710.000	-	-			686.356.000		

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DEJA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA	ALOKASI PENGHARGAAN DESA DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)
3	BELITANG	3.2001	PEMERINTAH DESA SIDO RAHAYU	607.490.000	139.077.000	-	-			746.567.000
		3.2002	PEMERINTAH DESA TAWANG REJO	607.490.000	121.558.000	-	-			729.048.000
		3.2006	PEMERINTAH DESA TANJUNG RAYA	544.646.000	183.671.000	-	-		35.000.000	763.317.000
		3.2007	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO	733.178.000	336.442.000	-	-			1.069.620.000
		3.2008	PEMERINTAH DESA HARJO WINANGUN	607.490.000	216.515.000	-	-			824.005.000
		3.2009	PEMERINTAH DESA PUJO RAHAYU	607.490.000	218.851.000	-	255.750.000			1.082.091.000
		3.2010	PEMERINTAH DESA TRIYOSO	607.490.000	152.544.000	-	-			760.034.000
		3.2011	PEMERINTAH DESA SUMBER SUKO	607.490.000	173.974.000	-	-			781.464.000
		3.2013	PEMERINTAH DESA SUKO SARI	544.646.000	150.362.000	-	-			695.008.000
		3.2014	PEMERINTAH DESA GUMAWANG	733.178.000	176.011.000	-	255.750.000			1.164.939.000
		3.2015	PEMERINTAH DESA BEDILAN	670.334.000	154.219.000	-	-			824.553.000
		3.2016	PEMERINTAH DESA TEGAL REJO	670.334.000	127.536.000	-	-			797.870.000
		3.2017	PEMERINTAH DESA SIDO GEDE	607.490.000	260.568.000	-	-			868.058.000
		3.2018	PEMERINTAH DESA SIDO MAKMUR	607.490.000	135.864.000	-	-			743.354.000
		3.2021	PEMERINTAH DESA SUKA JADI	544.646.000	164.012.000	-	-			708.658.000
		3.2022	PEMERINTAH DESA SERBAGUNA	544.646.000	68.228.000	-	-			612.874.000
		3.2023	PEMERINTAH DESA SUKARAMI	607.490.000	122.171.000	-	-			729.661.000
		3.2024	PEMERINTAH DESA GEDUNG REJO	607.490.000	223.417.000	-	-			830.907.000
		3.2025	PEMERINTAH DESA SIDODADI	607.490.000	122.180.000	-	-			729.670.000
		3.2026	PEMERINTAH DESA GUNUNG MAS	607.490.000	136.398.000	-	-			743.888.000
3.2027	PEMERINTAH DESA SUMBERSUKO JAYA	607.490.000	150.121.000	-	-			757.611.000		
3.2028	PEMERINTAH DESA KARANG KEMIRI	607.490.000	157.490.000	-	-			764.980.000		
3.2029	PEMERINTAH DESA MOJOSARI	544.646.000	100.072.000	-	255.750.000			900.468.000		
4	CEMPAKA	4.2001	PEMERINTAH DESA GUNUNG BATU	670.334.000	323.878.000	-	255.750.000			1.249.962.000
		4.2010	PEMERINTAH DESA ULAK BARU	544.646.000	268.810.000	-	-			813.456.000
		4.2011	PEMERINTAH DESA GUNUNG JATI	607.490.000	243.980.000	-	255.750.000			1.107.220.000
		4.2012	PEMERINTAH DESA KURIPAN	544.646.000	224.840.000	-	-			769.486.000
		4.2013	PEMERINTAH DESA NEGERI SAKTI	481.802.000	172.050.000	-	-	144.516.000		798.368.000
		4.2014	PEMERINTAH DESA CAMPANG TIGA ULU	670.334.000	482.174.000	-	-			1.152.508.000
		4.2015	PEMERINTAH DESA SUKARAJA	481.802.000	136.530.000	-	-			618.332.000
		4.2016	PEMERINTAH DESA CEMPAKA	670.334.000	366.941.000	-	-			1.037.275.000
		4.2017	PEMERINTAH DESA SUKABUMI	607.490.000	293.040.000	-	-	144.516.000		1.045.046.000
		4.2018	PEMERINTAH DESA CAMPANG TIGA ILIR	607.490.000	394.057.000	-	-			1.001.547.000
		4.2019	PEMERINTAH DESA MELUAI INDAH	607.490.000	245.224.000	-	-			852.714.000
		4.2020	PEMERINTAH DESA HARISAN JAYA	544.646.000	341.562.000	-	-			886.208.000
		4.2021	PEMERINTAH DESA CAMPANG TIGA JAYA	607.490.000	222.524.000	-	-			830.014.000

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DEJA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA	ALOKASI PENGHARGAAN DESA DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=[5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)
5	BUJAY PEMUKA PELIUNG	5.2001	PEMERINTAH DESA NEGERI PAKUAN	670.334.000	419.751.000	-	-	-	-	1.090.085.000
		5.2002	PEMERINTAH DESA NEGERI AGUNG	607.490.000	267.842.000	-	-	-	-	875.332.000
		5.2003	PEMERINTAH DESA BANU MAS	670.334.000	169.850.000	-	-	-	-	840.184.000
		5.2004	PEMERINTAH DESA BANU AYU	670.334.000	233.887.000	-	-	-	-	904.221.000
		5.2005	PEMERINTAH DESA PULAU NEGARA	607.490.000	450.392.000	-	-	-	-	1.057.882.000
		5.2006	PEMERINTAH DESA SAUNG DADI	607.490.000	191.993.000	-	-	-	-	799.483.000
		5.2007	PEMERINTAH DESA TRANTANG SAKTI	607.490.000	160.674.000	-	-	-	-	768.164.000
		5.2008	PEMERINTAH DESA PEMETUNG BASUKI	670.334.000	178.898.000	-	-	-	-	849.232.000
		5.2009	PEMERINTAH DESA PAHANG ASRI	670.334.000	201.052.000	-	-	-	-	871.386.000
		5.2010	PEMERINTAH DESA BANTAN	607.490.000	198.933.000	-	-	-	-	806.423.000
		5.2011	PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA	607.490.000	128.031.000	-	-	-	-	735.521.000
		5.2012	PEMERINTAH DESA NEGERI AGUNG JAYA	607.490.000	320.795.000	-	-	-	-	928.285.000
		5.2013	PEMERINTAH DESA BANTAN PELITA	607.490.000	184.909.000	-	-	-	-	792.399.000
6	MADANG SUKU II	6.2001	PEMERINTAH DESA KARANG NEGARA	544.646.000	136.240.000	-	-	-	-	680.886.000
		6.2002	PEMERINTAH DESA RIANG BANDUNG	670.334.000	467.021.000	-	-	-	-	1.137.355.000
		6.2005	PEMERINTAH DESA KOTA NEGARA	607.490.000	222.607.000	-	-	-	-	830.097.000
		6.2006	PEMERINTAH DESA KARTA NEGARA	544.646.000	295.114.000	-	-	-	-	839.760.000
		6.2007	PEMERINTAH DESA PANDAN AGUNG	607.490.000	276.549.000	-	-	-	-	884.039.000
		6.2009	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	607.490.000	222.310.000	-	-	-	-	829.800.000
		6.2010	PEMERINTAH DESA MARGO TANI	607.490.000	277.881.000	-	-	-	-	885.371.000
		6.2011	PEMERINTAH DESA JATI MULYA II	670.334.000	176.051.000	-	-	-	-	846.385.000
		6.2012	PEMERINTAH DESA PANDAN JAYA	607.490.000	197.904.000	-	-	-	-	805.394.000
		6.2014	PEMERINTAH DESA RASUAN BARU	544.646.000	319.801.000	-	-	-	-	864.447.000
		6.2020	PEMERINTAH DESA BANBANREJO	607.490.000	315.084.000	-	-	-	-	922.574.000
		6.2021	PEMERINTAH DESA SUKA NEGARA	607.490.000	224.780.000	-	-	-	-	832.270.000
		6.2022	PEMERINTAH DESA SRIKENCANA	544.646.000	123.014.000	-	-	-	-	667.660.000
		6.2023	PEMERINTAH DESA DADIMULYO	544.646.000	163.538.000	-	-	-	-	708.184.000
		6.2024	PEMERINTAH DESA RIANG BANDUNG ILIR	607.490.000	380.475.000	-	-	-	-	987.965.000
6.2025	PEMERINTAH DESA MARGOTANI II	544.646.000	194.998.000	-	-	-	-	739.644.000		
6.2026	PEMERINTAH DESA KOTA NEGARA TIMUR	544.646.000	145.099.000	-	-	-	-	689.745.000		
6.2027	PEMERINTAH DESA TALANG GIRING	544.646.000	156.709.000	-	-	-	-	701.355.000		
6.2028	PEMERINTAH DESA KALIREJO	481.802.000	179.283.000	-	-	-	-	661.085.000		

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DEJA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA	ALOKASI PENGHARGAAN DESA DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)
7	MADANG SUKU I	7.2002	PEMERINTAH DESA MENDAYUN	670.334.000	328.808.000	-	-			999.142.000
		7.2003	PEMERINTAH DESA GUNUNG TERANG	733.178.000	388.950.000	-	-	144.516.000		1.266.644.000
		7.2004	PEMERINTAH DESA KARTA MULIA	607.490.000	498.044.000	-	-			1.105.534.000
		7.2007	PEMERINTAH DESA SP. KERTA MULIA	481.802.000	184.857.000	-	-			666.659.000
		7.2014	PEMERINTAH DESA HARJO MULYO	607.490.000	265.362.000	-	-			872.852.000
		7.2015	PEMERINTAH DESA JAYA BAKTI	607.490.000	212.957.000	-	-			820.447.000
		7.2016	PEMERINTAH DESA RASUAN	670.334.000	402.463.000	-	-			1.072.797.000
		7.2017	PEMERINTAH DESA MENGULAK	670.334.000	500.559.000	-	-			1.170.893.000
		7.2019	PEMERINTAH DESA JATI SARI	607.490.000	302.785.000	-	-			910.275.000
		7.2021	PEMERINTAH DESA TRI DADI	607.490.000	216.903.000	-	-			824.393.000
		7.2022	PEMERINTAH DESA AGUNG JATI	670.334.000	384.218.000	-	-			1.054.552.000
		7.2023	PEMERINTAH DESA RASUAN DARAT	607.490.000	413.160.000	-	-			1.020.650.000
7.2024	PEMERINTAH DESA HARJO MULYO JAYA	607.490.000	257.214.000	-	-			864.704.000		
8	SEMENDAWAI SUKU III	8.2002	PEMERINTAH DESA JAYA MULYA	670.334.000	156.638.000	-	-			826.972.000
		8.2003	PEMERINTAH DESA GUNUNG SUGIH	544.646.000	130.486.000	-	-			675.132.000
		8.2007	PEMERINTAH DESA MARGO REJO	607.490.000	150.613.000	-	-			758.103.000
		8.2009	PEMERINTAH DESA TRIMOHARJO	670.334.000	155.556.000	-	-			825.890.000
		8.2010	PEMERINTAH DESA TAMAN AGUNG	607.490.000	149.730.000	-	-			757.220.000
		8.2011	PEMERINTAH DESA KRUIJON	544.646.000	141.392.000	-	-			686.038.000
		8.2013	PEMERINTAH DESA KARANG ENDAH	607.490.000	185.048.000	-	-			792.538.000
		8.2014	PEMERINTAH DESA SRIWANGI	607.490.000	160.970.000	-	-			768.460.000
		8.2015	PEMERINTAH DESA CAHAYA NEGERI	607.490.000	155.158.000	-	-			762.648.000
		8.2016	PEMERINTAH DESA SUKA MULYA	544.646.000	141.794.000	-	-			686.440.000
		8.2017	PEMERINTAH DESA TARAMAN	607.490.000	153.617.000	-	-			761.107.000
		8.2025	PEMERINTAH DESA MUJO RAHAYU	607.490.000	175.875.000	-	-			783.365.000
		8.2026	PEMERINTAH DESA TAMAN HARJO	607.490.000	193.885.000	-	-			801.375.000
		8.2027	PEMERINTAH DESA MARGODADI	607.490.000	190.059.000	-	-			797.549.000
		8.2028	PEMERINTAH DESA TARAMAN JAYA	607.490.000	196.799.000	-	-			804.289.000
		8.2029	PEMERINTAH DESA KARANG MARGA	607.490.000	158.141.000	-	-			765.631.000
		8.2030	PEMERINTAH DESA TRIMO REJO	607.490.000	140.210.000	-	-			747.700.000
8.2031	PEMERINTAH DESA SRIWANGI ULU	607.490.000	124.037.000	-	-			731.527.000		
8.2032	PEMERINTAH DESA TAMAN MULYO	544.646.000	223.575.000	-	-			768.221.000		

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DEJA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA	ALOKASI PENGHARGAAN DESA DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)
9	BELITANG II	9.2004	PEMERINTAH DESA TANJUNG KEMUNING	607.490.000	191.654.000	-	-	144.516.000		943.660.000
		9.2005	PEMERINTAH DESA RAMAN JAYA	544.646.000	172.352.000	-	-	144.516.000		861.514.000
		9.2006	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA	670.334.000	269.224.000	-	255.750.000	144.516.000		1.339.824.000
		9.2007	PEMERINTAH DESA SUMBER REJO	544.646.000	227.814.000	-	-	144.516.000		916.976.000
		9.2008	PEMERINTAH DESA SUMBER SARI	607.490.000	256.403.000	-	-			863.893.000
		9.2009	PEMERINTAH DESA TEGAL SARI	607.490.000	175.439.000	-	-	144.516.000		927.445.000
		9.2010	PEMERINTAH DESA SRI BANTOLO	544.646.000	156.497.000	-	255.750.000	144.516.000		1.101.409.000
		9.2011	PEMERINTAH DESA SUMBER RAHAYU	544.646.000	207.797.000	-	-	144.516.000		896.959.000
		9.2012	PEMERINTAH DESA MARGO MULYO	670.334.000	357.770.000	-	255.750.000			1.283.854.000
		9.2015	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	481.802.000	141.206.000	-	-			623.008.000
		9.2016	PEMERINTAH DESA KARANG MANIK	607.490.000	196.387.000	-	-	144.516.000		948.393.000
		9.2017	PEMERINTAH DESA SUMBER HARAPAN	670.334.000	269.501.000	-	-	144.516.000		1.084.351.000
		9.2018	PEMERINTAH DESA KELI REJO	607.490.000	159.048.000	-	-	144.516.000		911.054.000
		9.2019	PEMERINTAH DESA TOTO REJO	607.490.000	262.803.000	-	-			870.293.000
		9.2020	PEMERINTAH DESA KARANG JAYA	544.646.000	176.392.000	-	-	144.516.000		865.554.000
		9.2021	PEMERINTAH DESA KEMUNING JAYA	607.490.000	185.550.000	-	-	144.516.000		937.556.000
		9.2022	PEMERINTAH DESA BANGUN REJO	544.646.000	197.897.000	-	-	144.516.000		887.059.000
		9.2023	PEMERINTAH DESA BATU MAS	544.646.000	162.760.000	-	-	144.516.000		851.922.000
		9.2024	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA	607.490.000	197.728.000	-	-			805.218.000
		9.2025	PEMERINTAH DESA SRIJAYA	544.646.000	137.258.000	-	-	144.516.000		826.420.000
9.2026	PEMERINTAH DESA TEGAL BESAR	607.490.000	199.649.000	-	-	144.516.000		951.655.000		
9.2027	PEMERINTAH DESA DARMA BUANA	544.646.000	133.037.000	-	-	144.516.000		822.199.000		
9.2028	PEMERINTAH DESA REJO MULYO	544.646.000	211.728.000	-	-			756.374.000		
9.2029	PEMERINTAH DESA PURWOREJO	544.646.000	184.576.000	-	-			729.222.000		
10	BELITANG III	10.2001	PEMERINTAH DESA KUTOSARI	607.490.000	159.330.000	-	-			766.820.000
		10.2002	PEMERINTAH DESA NUSA RAYA	607.490.000	224.220.000	-	-			831.710.000
		10.2003	PEMERINTAH DESA NUSA TUNGGAL	607.490.000	245.596.000	-	-			853.086.000
		10.2004	PEMERINTAH DESA NUSA BALI	607.490.000	175.123.000	-	-	144.516.000		927.129.000
		10.2005	PEMERINTAH DESA NUSA BAKTI	670.334.000	152.087.000	-	255.750.000			1.078.171.000
		10.2006	PEMERINTAH DESA NUSA JAYA	607.490.000	144.307.000	-	-			751.797.000
		10.2007	PEMERINTAH DESA NUSA TENGGARA	607.490.000	155.848.000	-	-			763.338.000
		10.2008	PEMERINTAH DESA NUSA AGUNG	544.646.000	135.578.000	-	-			680.224.000
		10.2009	PEMERINTAH DESA NUSA MAJU	607.490.000	168.329.000	-	-			775.819.000
		10.2010	PEMERINTAH DESA SENU MARGA	544.646.000	149.879.000	-	-			694.525.000
		10.2011	PEMERINTAH DESA KARANG SARI	607.490.000	100.307.000	-	-			707.797.000
		10.2013	PEMERINTAH DESA TRIKARYA	670.334.000	303.763.000	-	255.750.000			1.229.847.000
		10.2016	PEMERINTAH DESA SUKA NEGARA	607.490.000	180.187.000	-	-			787.677.000
		10.2017	PEMERINTAH DESA KARANG JADI	544.646.000	158.247.000	-	-			702.893.000
		10.2018	PEMERINTAH DESA DADI REJO	607.490.000	213.942.000	-	-			821.432.000
		10.2019	PEMERINTAH DESA GANTI WARNO	607.490.000	158.852.000	-	-			766.342.000
10.2020	PEMERINTAH DESA SINAR BALI	544.646.000	148.606.000	-	255.750.000			949.002.000		
10.2021	PEMERINTAH DESA SUMBER REJO	544.646.000	173.835.000	-	-			718.481.000		
10.2022	PEMERINTAH DESA RINGIN SARI	607.490.000	179.655.000	-	-			787.145.000		
10.2023	PEMERINTAH DESA KARYA MAJU	544.646.000	180.025.000	-	-			724.671.000		

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DEJA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA	ALOKASI PENGHARGAAN DESA DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)
11	BUNGA MAYANG	11.2001	PEMERINTAH DESA BATURAJA BUNGIN	670.334.000	319.717.000	-	-	-	-	990.051.000
		11.2002	PEMERINTAH DESA TULANG BAWANG	607.490.000	189.485.000	-	-	-	-	796.975.000
		11.2003	PEMERINTAH DESA SABAHLOH	544.646.000	150.435.000	-	-	-	-	695.081.000
		11.2004	PEMERINTAH DESA NEGERI RATU	607.490.000	196.803.000	-	-	-	-	804.293.000
		11.2005	PEMERINTAH DESA PERACAK	670.334.000	415.828.000	-	-	-	-	1.086.162.000
		11.2006	PEMERINTAH DESA NEGERI RATU BARU	607.490.000	214.813.000	-	-	-	-	822.303.000
		11.2007	PEMERINTAH DESA TUNAS PERACAK	607.490.000	354.553.000	-	-	-	-	962.043.000
		11.2008	PEMERINTAH DESA LUKABARU	607.490.000	247.594.000	-	-	-	-	855.084.000
12	BUAY MADANG TIMUR	12.2001	PEMERINTAH DESA TANJUNG MAS	607.490.000	195.930.000	-	-	144.516.000	-	947.936.000
		12.2002	PEMERINTAH DESA TANJUNG SARI	607.490.000	188.438.000	-	255.750.000	144.516.000	-	1.196.194.000
		12.2003	PEMERINTAH DESA TEKO REJO	607.490.000	294.333.000	-	255.750.000	-	-	1.157.573.000
		12.2004	PEMERINTAH DESA SUMBER ASRI	607.490.000	203.200.000	-	-	144.516.000	-	955.206.000
		12.2005	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	607.490.000	419.575.000	-	-	-	-	1.027.065.000
		12.2006	PEMERINTAH DESA SRIKATON	733.178.000	151.866.000	-	-	-	-	885.044.000
		12.2007	PEMERINTAH DESA LIMAN SARI	607.490.000	148.289.000	-	255.750.000	144.516.000	-	1.156.045.000
		12.2008	PEMERINTAH DESA SUMBER HARJO	670.334.000	205.141.000	-	255.750.000	144.516.000	-	1.275.741.000
		12.2009	PEMERINTAH DESA SUMBER MULYO	670.334.000	204.740.000	-	255.750.000	144.516.000	-	1.275.340.000
		12.2010	PEMERINTAH DESA KARANG TENGAH	607.490.000	141.797.000	-	255.750.000	144.516.000	-	1.149.553.000
		12.2011	PEMERINTAH DESA BANGUN HARJO	607.490.000	107.457.000	-	255.750.000	144.516.000	-	1.115.213.000
		12.2012	PEMERINTAH DESA TAMBAK BOYO	670.334.000	295.180.000	-	-	144.516.000	-	1.110.030.000
		12.2013	PEMERINTAH DESA PENGANDONAN	544.646.000	333.955.000	-	-	-	-	878.601.000
		12.2014	PEMERINTAH DESA REJO DADI	607.490.000	148.872.000	-	-	144.516.000	-	900.878.000
		12.2015	PEMERINTAH DESA SUKOHARJO	607.490.000	147.007.000	-	-	-	-	754.497.000
		12.2016	PEMERINTAH DESA SUMEDANG SARI	544.646.000	114.551.000	-	-	-	-	659.197.000
		12.2017	PEMERINTAH DESA ROWODADI	607.490.000	150.186.000	-	-	144.516.000	-	902.192.000
		12.2018	PEMERINTAH DESA SUKODADI	544.646.000	155.306.000	-	255.750.000	144.516.000	-	1.100.218.000
		12.2019	PEMERINTAH DESA KUMPUL REJO	544.646.000	109.475.000	-	255.750.000	-	-	909.871.000
		12.2020	PEMERINTAH DESA METRO REJO	544.646.000	164.592.000	-	255.750.000	-	-	964.988.000
		12.2021	PEMERINTAH DESA KEDU	544.646.000	159.058.000	-	-	144.516.000	-	848.220.000
		12.2022	PEMERINTAH DESA KEDUNG REJO	544.646.000	160.085.000	-	255.750.000	144.516.000	-	1.104.997.000
		12.2023	PEMERINTAH DESA BANYUMAS ASRI	544.646.000	155.460.000	-	255.750.000	-	-	955.856.000
12.2024	PEMERINTAH DESA GUMUK REJO	544.646.000	145.086.000	-	-	-	-	689.732.000		
12.2025	PEMERINTAH DESA TANJUNG MULYA	544.646.000	161.638.000	-	-	144.516.000	-	850.800.000		
12.2026	PEMERINTAH DESA RAMAN AGUNG	544.646.000	236.844.000	-	255.750.000	144.516.000	-	1.181.756.000		
12.2027	PEMERINTAH DESA BUKIT MAS	544.646.000	216.275.000	-	-	-	-	760.921.000		
12.2028	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG	544.646.000	141.004.000	-	-	144.516.000	-	830.166.000		
12.2029	PEMERINTAH DESA BERASAN MULYA	607.490.000	142.456.000	-	255.750.000	-	-	1.005.696.000		
12.2030	PEMERINTAH DESA SUMBER TANI	544.646.000	138.631.000	-	-	144.516.000	-	827.793.000		

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DEJA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA	ALOKASI PENGHARGAAN DESA DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)
13	MADANG SUKU III	13.2001	PEMERINTAH DESA BANDING AGUNG	544.646.000	271.442.000	-	-	-	-	816.088.000
		13.2002	PEMERINTAH DESA NIKAN	544.646.000	275.262.000	-	-	-	-	819.908.000
		13.2003	PEMERINTAH DESA SURABAYA	607.490.000	235.298.000	-	-	-	-	842.788.000
		13.2004	PEMERINTAH DESA WANABAKTI	670.334.000	322.593.000	-	-	-	-	992.927.000
		13.2005	PEMERINTAH DESA BATU MARTA VI	670.334.000	218.619.000	-	255.750.000	144.516.000	-	1.289.219.000
		13.2006	PEMERINTAH DESA KARYA MAKMUR	607.490.000	229.820.000	-	255.750.000	-	-	1.093.060.000
		13.2007	PEMERINTAH DESA BINA AMARTA	670.334.000	230.238.000	-	-	144.516.000	-	1.045.088.000
		13.2008	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	607.490.000	262.725.000	-	255.750.000	-	-	1.125.965.000
		13.2009	PEMERINTAH DESA BATU MARTA X	607.490.000	303.321.000	-	-	144.516.000	-	1.055.327.000
		13.2010	PEMERINTAH DESA MARTA V JAYA	544.646.000	321.971.000	-	-	-	-	866.617.000
14	SEMENDAWAI BARAT	14.2001	PEMERINTAH DESA TANJUNG KUKUH	607.490.000	308.824.000	-	-	-	-	916.314.000
		14.2002	PEMERINTAH DESA BETUNG	607.490.000	390.767.000	-	-	-	-	998.257.000
		14.2003	PEMERINTAH DESA TANJUNG MAS	544.646.000	281.199.000	-	-	-	-	825.845.000
		14.2004	PEMERINTAH DESA MENANGA BESAR	607.490.000	450.150.000	-	-	-	-	1.057.640.000
		14.2005	PEMERINTAH DESA MENANGA TENGAH	670.334.000	482.682.000	-	-	-	-	1.153.016.000
		14.2006	PEMERINTAH DESA ADU MANIS	544.646.000	235.452.000	-	-	-	-	780.098.000
		14.2007	PEMERINTAH DESA SUKA NEGERI	607.490.000	253.305.000	-	-	-	-	860.795.000
		14.2008	PEMERINTAH DESA KANGKUNG	544.646.000	220.384.000	-	-	-	-	765.030.000
		14.2009	PEMERINTAH DESA SRI TANJUNG	544.646.000	270.720.000	-	-	-	-	815.366.000
		14.2010	PEMERINTAH DESA KANGKUNG ILIR	544.646.000	266.053.000	-	-	-	-	810.699.000
		14.2011	PEMERINTAH DESA BETUNG TIMUR	544.646.000	267.536.000	-	-	-	-	812.182.000
		14.2012	PEMERINTAH DESA MENANGA SARI	544.646.000	217.556.000	-	-	-	-	762.202.000
15	SEMENDAWAI TIMUR	15.2001	PEMERINTAH DESA KARANG MELATI	607.490.000	174.400.000	-	-	-	-	781.890.000
		15.2002	PEMERINTAH DESA KARANG MENJANGAN	607.490.000	278.568.000	-	-	-	-	886.058.000
		15.2003	PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	607.490.000	219.398.000	-	-	-	-	826.888.000
		15.2004	PEMERINTAH DESA TULUNG HARAPAN	607.490.000	253.527.000	-	-	-	-	861.017.000
		15.2005	PEMERINTAH DESA KOTA TANAH	607.490.000	192.709.000	-	-	-	-	800.199.000
		15.2006	PEMERINTAH DESA NIRWANA	607.490.000	465.697.000	-	-	-	-	1.073.187.000
		15.2007	PEMERINTAH DESA BRUNAI MULIA	607.490.000	307.476.000	-	-	-	-	914.966.000
		15.2008	PEMERINTAH DESA KOTA MULYA	544.646.000	155.182.000	-	-	-	-	699.828.000
		15.2009	PEMERINTAH DESA BUNGIN JAYA	544.646.000	178.744.000	-	-	-	-	723.390.000
		15.2010	PEMERINTAH DESA BURNAI JAYA	544.646.000	196.721.000	-	-	-	-	741.367.000
		15.2011	PEMERINTAH DESA MULIA JAYA	607.490.000	254.042.000	-	-	-	-	861.532.000
		15.2012	PEMERINTAH DESA MELATI JAYA	607.490.000	182.403.000	-	-	-	-	789.893.000
		15.2013	PEMERINTAH DESA KARANG MULYA	607.490.000	169.598.000	-	-	-	-	777.088.000
		15.2014	PEMERINTAH DESA WANASARI	607.490.000	179.232.000	-	-	-	-	786.722.000
		15.2015	PEMERINTAH DESA HARAPAN JAYA	544.646.000	208.222.000	-	-	-	-	752.868.000
		15.2016	PEMERINTAH DESA MELATI AGUNG	607.490.000	210.106.000	-	-	-	-	817.596.000
		15.2017	PEMERINTAH DESA WANAMAKMUR	607.490.000	250.657.000	-	-	-	-	858.147.000
15.2018	PEMERINTAH DESA BAWANG TIKAR	544.646.000	165.674.000	-	-	-	-	710.320.000		
15.2019	PEMERINTAH DESA KARYA BAKTI	544.646.000	238.498.000	-	-	-	-	783.144.000		

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DEJA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA	ALOKASI PENGHARGAAN DESA DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)
16	JAYAPURA	16.2001	PEMERINTAH DESA JAYAPURA	607.490.000	316.694.000	-	-	-	-	924.184.000
		16.2002	PEMERINTAH DESA BUNGA MAYANG	607.490.000	171.443.000	-	-	-	-	778.933.000
		16.2003	PEMERINTAH DESA WAY SALAK	544.646.000	258.733.000	-	-	-	-	803.379.000
		16.2004	PEMERINTAH DESA MENDAH	670.334.000	611.638.000	-	-	-	-	1.281.972.000
		16.2005	PEMERINTAH DESA TUMIJAYA	607.490.000	305.968.000	-	-	-	-	913.458.000
		16.2006	PEMERINTAH DESA CONDONG	607.490.000	248.768.000	-	-	-	-	856.258.000
		16.2007	PEMERINTAH DESA PERACAK JAYA	544.646.000	266.936.000	-	-	-	-	811.582.000
		16.2008	PEMERINTAH DESA KAMBANG	544.646.000	196.296.000	-	-	-	-	740.942.000
17	BELITANG JAYA	17.2001	PEMERINTAH DESA REJOSARI	607.490.000	148.275.000	-	-	-	144.516.000	900.281.000
		17.2002	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	607.490.000	211.222.000	-	-	-	144.516.000	963.228.000
		17.2003	PEMERINTAH DESA BANJAR REJO	544.646.000	175.678.000	-	-	-	144.516.000	864.840.000
		17.2004	PEMERINTAH DESA PANCA TUNGGAL	607.490.000	184.239.000	-	-	-	144.516.000	936.245.000
		17.2005	PEMERINTAH DESA MARGA KOYO	544.646.000	226.901.000	-	-	-	144.516.000	916.063.000
		17.2006	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	607.490.000	176.455.000	-	-	-	144.516.000	928.461.000
		17.2007	PEMERINTAH DESA KARSA JAYA	607.490.000	121.261.000	-	-	-	144.516.000	873.267.000
		17.2008	PEMERINTAH DESA WINDUSARI	544.646.000	178.643.000	-	-	-	144.516.000	867.805.000
		17.2009	PEMERINTAH DESA KARYA MAKMUR	607.490.000	164.097.000	-	255.750.000	-	144.516.000	1.171.853.000
		17.2010	PEMERINTAH DESA GIRI MULYO	544.646.000	184.805.000	-	-	-	-	729.451.000
		17.2011	PEMERINTAH DESA MAGUGONDO	544.646.000	153.605.000	-	-	-	144.516.000	842.767.000
		17.2012	PEMERINTAH DESA ARGOMULYO	544.646.000	174.169.000	-	-	-	144.516.000	863.331.000
		17.2013	PEMERINTAH DESA REJOSARI JAYA	607.490.000	161.297.000	-	-	-	144.516.000	913.303.000
18	BELITANG MADANG RAYA	18.2001	PEMERINTAH DESA TUGU MULYO	670.334.000	358.051.000	-	-	-	-	1.028.385.000
		18.2002	PEMERINTAH DESA BANGSA NEGARA	607.490.000	235.460.000	-	-	-	-	842.950.000
		18.2003	PEMERINTAH DESA TUGU HARUM	733.178.000	272.697.000	-	255.750.000	-	-	1.261.625.000
		182004	PEMERINTAH DESA TULUS AYU	670.334.000	150.096.000	-	-	-	-	820.430.000
		18.2005	PEMERINTAH DESA YOSOWINANGUN	607.490.000	207.108.000	-	-	-	-	814.598.000
		18.2006	PEMERINTAH DESA KARANG BINANGUN	607.490.000	206.162.000	-	-	-	-	813.652.000
		18.2007	PEMERINTAH DESA JATI MULYO I	607.490.000	240.385.000	-	-	-	-	847.875.000
		18.2008	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI I	607.490.000	261.408.000	-	-	-	-	868.898.000
		18.2009	PEMERINTAH DESA PELITA JAYA	607.490.000	226.579.000	-	-	-	-	834.069.000
		18.2010	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	544.646.000	172.978.000	-	-	-	-	717.624.000
		18.2011	PEMERINTAH DESA LUBUK HARJO	670.334.000	236.631.000	-	-	-	-	906.965.000
		18.2012	PEMERINTAH DESA TANAH MERAH	733.178.000	386.733.000	-	-	-	-	1.119.911.000
		18.2013	PEMERINTAH DESA RANTAU JAYA	670.334.000	253.651.000	-	255.750.000	-	-	1.179.735.000
		18.2014	PEMERINTAH DESA TEBING SARI MULYA	544.646.000	217.128.000	-	-	-	-	761.774.000
		18.2015	PEMERINTAH DESA MARGA CINTA	607.490.000	160.209.000	-	-	-	-	767.699.000
18.2016	PEMERINTAH DESA KARANG BINANGUN II	607.490.000	167.955.000	-	-	-	-	775.445.000		

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DEJA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA	ALOKASI PENGHARGAAN DESA DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)
19	BELITANG MULYA	19.2001	PEMERINTAH DESA SARI GUNA	544.646.000	94.166.000	-	-	-	-	638.812.000
		19.2002	PEMERINTAH DESA SIDO WALUYO	544.646.000	115.010.000	-	-	-	-	804.172.000
		19.2003	PEMERINTAH DESA SUGIH WARAS	544.646.000	111.546.000	-	-	-	144.516.000	656.192.000
		19.2004	PEMERINTAH DESA REJO SARI	607.490.000	149.422.000	-	-	-	-	756.912.000
		19.2005	PEMERINTAH DESA PETANGGAN	607.490.000	80.376.000	-	255.750.000	-	-	943.616.000
		19.2006	PEMERINTAH DESA PURWODADI	670.334.000	169.482.000	-	-	-	-	839.816.000
		19.2007	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	670.334.000	143.356.000	-	255.750.000	-	-	1.069.440.000
		19.2008	PEMERINTAH DESA ULAK BUNTAR	607.490.000	276.622.000	-	-	-	144.516.000	1.028.628.000
		19.2009	PEMERINTAH DESA SRIBUDAYA	544.646.000	206.011.000	-	-	-	-	750.657.000
		19.2010	PEMERINTAH DESA SUKOHARJO	544.646.000	139.511.000	-	-	-	-	684.157.000
		19.2011	PEMERINTAH DESA TULUNG SARI	607.490.000	125.205.000	-	-	-	-	732.695.000
		19.2012	PEMERINTAH DESA MULYA SARI	481.802.000	124.924.000	-	255.750.000	-	144.516.000	1.006.992.000
20	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	20.2001	PEMERINTAH DESA SRI BUNGA	607.490.000	352.387.000	-	255.750.000	-	-	1.215.627.000
		20.2002	PEMERINTAH DESA ANYAR	607.490.000	213.430.000	-	255.750.000	-	-	1.076.670.000
		20.2003	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI II	544.646.000	276.900.000	-	-	-	-	821.546.000
		20.2004	PEMERINTAH DESA RAWASARI	544.646.000	208.207.000	-	-	-	-	752.853.000
		20.2005	PEMERINTAH DESA SURYA MENANG	544.646.000	189.321.000	-	255.750.000	-	-	989.717.000
		20.2006	PEMERINTAH DESA MUNCAK KABAU	670.334.000	401.630.000	-	255.750.000	-	-	1.327.714.000
		20.2007	PEMERINTAH DESA SRI BULAN	607.490.000	403.817.000	-	-	-	-	1.011.307.000
JUMLAH				182.707.846.000	67.342.498.000	-	11.764.500.000	8.381.928.000	35.000.000	270.231.772.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

LANOSIN